

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burosh, Abu Daud, 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2009, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Yamin, Muhammad, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, Penerbit Siguntang, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*, Nusa Media, Bandung.
- Hutabarat, Martin H., 1996, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Teris, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Labolo, Muhadam, 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.

- Mansyur, Achmad, 2018, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 2013, *Politik Desa di Indonesia*, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Prasetya, Dila Eka Juli dan Isharyanto, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, Absolute Media, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1999-2002 Tahun Sidang 1999*, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta.
- Simorangkir, Bonar, 2020, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1984, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wasistiono, Sadu, Etin Indrayani dan Andi Pinoto, *Memahami Asas Tugas Pembantuan (Melalui Pandangan Teoretik, Legalistik, dan Implementatif)*, Fokusmedia, Bandung.
- Wijayanti, Septi Nur dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Fakultas Hukum UMY & Divisi Publikasi Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta.
- Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

Asrul, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan Penguatan Hak Ulayat”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, Maret 2017.

Irawan, Agus, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Jun, Zheng, “Decentralism of the Contemporary Unitary System in China”, *Hebei Legal Science*, No. 1, Januari 2002.

Pakaya, Jefri S., “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.

Pitono, Andi, “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.

Putri, Lia Sartika, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.

Suardita, I. B. Gede Wahyu Pratama dan I Ketut, “Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *E-jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Vol. 03, No. 02, Mei 2015.

Wibowo, Angga Trie Sugiarto, “Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, No.1, 2016.

Wicaksono, Dian Agung, “Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2015.

_____, Dian Agung, dan Cora Kristin Mulyani, “*Quo Vadis* Pengaturan Desa sebagai Penerima Tugas Pembantuan (Studi Kasus Kalurahan dalam Melaksanakan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 1, April 2023.

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Amrullah, Muhammad Karim, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Angkianata, Yongki Putut, 2015, *Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Hermansyah, Ricky, 2020, *Analisis Peralihan Pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kristiyanto, Andi, 2022, *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa*, Tesis, Program Studi

Magister Hukum Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sena, I Nyoman Pranata, 2016, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 perihal mengkaji Pasal
59 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 22 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 23 Juli 2007.

INTERNET

KBBI Daring, “Anomali”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anomali>, diakses 13
Mei 2023.

DOKUMEN LAIN

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan
Pusat dan Daerah.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan

Daerah, Jakarta, tanggal 2 April 2012.